

Visi-Misi Prabowo Dinilai Tak Konkret

Komnas HAM menganggap strategi Prabowo-Sandiaga dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak meyakinkan publik.

Koran TEMPO - 21 Feb '19 (5):

Rezki Alvionitasari

rezki.alvionitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam urusan penegakan HAM bersifat normatif. Ketua Tim Pemantau Pemilu 2019 dari Komnas HAM, Hairansyah, mengatakan visi-misi pasangan calon presiden nomor urut 02 itu tidak mengungkap strategi konkret dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

"Ada penghormatan terhadap hukum dan kemajuan hak asasi manusia, tapi apa strategi konkretnya?" kata dia dalam acara bedah visi-misi pasangan Prabowo-Sandiaga di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, kemarin.

La menganggap visi-misi Prabowo-Sandiaga kurang mampu meyakinkan publik bahwa mereka akan sanggup menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Hairansyah memandang hanya satu poin dalam visi-misi pasangan ini yang cukup tegas, yaitu tidak akan terikat oleh konflik kepentingan dalam menanganikan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, berpendapat dengan penilaian Hairansyah. Ia menilai Prabowo-Sandiaga seolah-olah tidak mempersiapkan dengan baik visi-misi dalam bidang penegakan hak asasi manusia. "Tak ada jawaban yang meyakinkan dari kubu Prabowo saat ditanya mengenai strategi penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia," ujarnya.

Usman menyebutkan beberapa perkara pelanggaran HAM berat, seperti penembakan mahasiswa Trisakti 1998; peristiwa Semanggi I dan II 1998-1999; kerusuhan Mei 1998, pembantaian di Talangsari, Lampung, 1989; kasus di Wamena, Papua, 2003; peristiwa Wasior; Manokwari, Papua, 2001; tragedi Jambo Keupok di Aceh



Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokman (tengah) dan Ansori Sinungan dalam acara bedah visi-misi calon presiden dan wakil presiden 2019 bidang HAM di kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin.

Catatan HAM buat Prabowo-Sandiaga

BADAN Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan berbagai solusi untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Salah satunya memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional, bukan dari partai politik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menganggap solusi ini tidak cukup ampuh untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Komisi memberikan sejumlah catatan terhadap strategi pasangan calon presiden nomor urut dua ini dalam urusan penegakan HAM.

Program Aksi Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno

- Melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan mencegah diskriminasi.
- Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.
- Menghentikan ancaman persekusi terhadap individu dan organisasi masyarakat.
- Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat dalam kehidupan demokrasi yang sehat.

Catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- Bersifat normatif dan tidak mengungkap strategi konkret dalam menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu.
- Kurang mampu meyakinkan publik dalam upaya penegakan HAM.
- Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu tidak cukup hanya dengan menunjuk Jaksa Agung dari non-partai politik.
- Perlu dilakukan perubahan sistem yang mendukung upaya-upaya penyelesaian perkara-perkara pelanggaran HAM.
- Tidak muncul terobosan baru untuk menyelesaikan perkara pelanggaran HAM berat pada masa lalu.

Selatan 2003; tragedi Simpan Kertas Kraft Aceh di Dewantara, Aceh, 1999; tragedi Rumoh Geudong di Aceh 1989-1998; peristiwa pembantaian 1965; serta peristiwa Tanjung Priok 1984. Menurut Usman, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga tidak menjawab dengan tegas ihwal penyelesaian perkara-perkara tersebut.

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menuturkan lembaganya sudah menyelidiki per-

karra pelanggaran HAM berat tersebut. Berkas penyelidikan perkara itu pun pernah diserahkan ke Kejaksaan Agung, tapi dikembalikan lagi ke Latuharhary. "Kami berharap laporan penyelidikan kami ditindaklanjuti daripada bolak-balik ke Komisi Nasional setiap pergantian presiden," ucapnya.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ansori Sinungan, mengakui visi-misi jagoan mereka memang tidak mengungkap secara

detail strategi penanganan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat. Ia berdalih, ketika semua visi-misi Prabowo-Sandiaga dilaksanakan dengan baik, otomatis penegakan hak asasi manusia akan terpenuhi. "Visi-misi Prabowo-Sandiaga lebih ke hak sipil, politik, dan ekonomi," tuturnya.

Habiburokman, juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga lainnya, mengatakan salah satu komitmen pasangan mereka di bidang ini adalah memastikan Jaksa Agung tidak berasal dari partai politik atau tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. "Jaksa Agung akan berasal dari kalangan yang independen dan profesional," katanya.

Solusi ini, menurut Hairansyah, tidak serta-merta akan dapat menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu. "Kalau hanya bicara satu isu saja soal personal Jaksa Agung, itu tidak menyelesaikan persoalan," ujarnya. Ia menuturkan ide penegakan HAM harus menyeluruh dari hulu sampai hilir.

